LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2024

LKjIP
BPPKAD
Tahun 2024

Disusun Oleh:
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Jl. Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo
Telp. (0335) 420648 ~ Fax. (0335) 428288
bppkad.probolinggokota.go.id
bppkadkotaprobolinggo@gmail.com

Halaman

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo atas pelaksanaan program dan kegiatan bidang keuangan di Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dengan Walikota Probolinggo.

Capaian kinerja yang disajikan dalam LKjIP ini berupa indikator kinerja yang ada dalam program Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja sasaran strategis. Ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis diharapkan dapat mendorong tercapaianya misi-misi pembangunan di Kota Probolinggo.

Melalui LKjIP ini, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKjIP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kota Probolinggo pada tahun-tahun mendatang.

Di pihak lain, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menyadari bahwa tantangan pembangunan masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras untuk tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan visi dan misi yang telah dicanangkan dapat tercapai. Kami menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan

masukan demi perbaikan dimasa datang, dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Probolinggo, Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P.,M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19730626 199803 2 006

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Gambaran Umum Organisasi 1

1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

2.1. Rencana Strategis 6

2.2. Program dan Kegiatan 11

2.3. Perjanjian Kinerja 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 15

1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 15

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja . 15

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 16

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir periode Renstra 16

d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan..... 17

e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 18

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 19

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan..... 19

h. Analis Program/kegiatan yang Menunjang

keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja 20

2) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 21

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja . 21

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 24

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir periode Renstra 25

d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan 26

e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran..... 26

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 28

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan..... 29

h. Analis Program/kegiatan yang Menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja 30

3.2. Realisasi Anggaran..... 32

BAB IV PENUTUP..... 34

4.1. Kesimpulan 34

4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja 35

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra
2. Pernjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo sebagai berikut:

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan.

(3) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keuangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Keuangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah dibidang Keuangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri atas :
   1. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
   2. Subbidang Penagihan dan Pengolah Data.

d. Bidang Pendapatan, terdiri atas :
   1. Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan; dan
   2. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan.

e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas :
   1. Subbidang Pengelolaan Kas;
   2. Subbidang Perbendaharaan; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

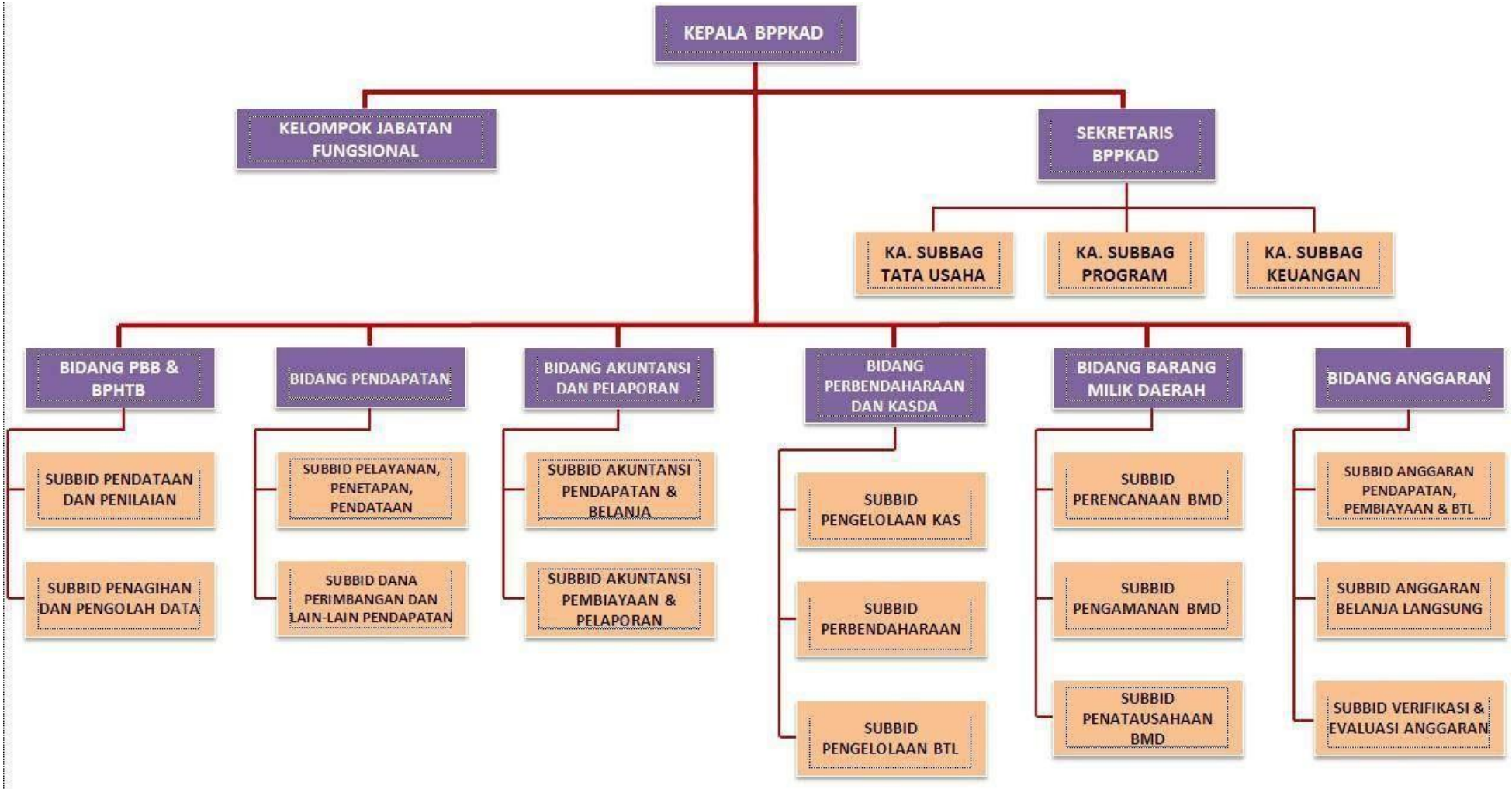
f. Bidang Anggaran, terdiri atas :
   1. Subbidang Anggaran Anggaran Belanja Langsung;
   2. Subbidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
   1. Subbidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja; dan
   2. Subbidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan.

h. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri atas :
   1. Subbidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
   2. Subbidang Pengamananan Barang Milik Daerah; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
KOTA PROBOLINGGO



Sumber : Perwali No. 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BPPKAD

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo saat ini didukung oleh sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Adapun distribusi dan daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.1. Daftar ASN Berdasarkan Golongan

Golongan/ Ruang	Jml	Eselon							Jenis Jabatan			
		II-a	II-b	III-a	III-b	IV-a	IV-b	Non	Struk	JFU	JFT	Non
Golongan IV/b	1		1									
Golongan IV/a	1					13			1			
Golongan III/d	13			1	4	5		3	10	3		
Golongan III/c	3				1	2			3			
Golongan III/b	12					6		6	6	6		
Golongan III/a	13							13		5	8	
Golongan II/d	12							12		1	11	
Golongan II/c	11							11		2	9	
Golongan II/b	0											
Golongan II/a	1							1				
Golongan I/d												
Non ASN	66											
ASN + Non ASN	**124**			**1**	**5**	**26**		**46**	**20**	**17**	**28**	

Komposisi pegawai pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo berdasarkan tingkat Pendidikan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2. Daftar ASN Berdasarkan Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ASN	NON ASN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	12	-	12 Orang
2	Sarjana (S1)	28	38	66 Orang
3	D3	13	1	14 Orang

NO	JENJANG PENDIDIKAN	ASN	NON ASN	JUMLAH
4	SLTA	11	19	30 Orang
5	SLTP	2	-	2 Orang
	Jumlah	**13**	**19**	**32 Orang**

I.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas pencapaian sasaran strategis BPPKAD Kota Probolinggo pada fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaran tugas, pokok dan tata kerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BPPKAD Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kota Probolinggo masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan.
2. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai belanja daerah.
3. Potensi pajak daerah belum digali maksimal dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan pajak masih belum dilakukan secara komprehensif.
4. Pengelolaan aset daerah membutuhkan usaha yang besar mulai dari tahap perencanaan, pengamanan dan penatausahaan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam mendukung proses pengelolaan keuangan dan dibutuhkan inovasi dan terobosan yang lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang disusun melalui sistem yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo. Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan akuntabel dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan proses perencanaan politik, maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan RPJMD Kota Probolinggo ini harus menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo

Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

"MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN"

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 tersebut, maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial
Misi 2 Sumberdaya manusia dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas
Misi 3 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Misi 4 Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mendukung Misi ke-4 dalam RPJMD Kota Probolinggo. Untuk mewujudkan Misi ke-4 tersebut maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam rencana strategis. Tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo meneruskan dari sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Kota Probolinggo yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas**, dengan indikator tujuan yaitu **Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**.

Untuk mencapai tujuan tersebut lebih spesifik difokuskan pada Indikator tujuan yaitu: Meraih Opini WTP dari BPK terhadap LKPD, jadi 5 (lima) tahun ke depan tujuan utama BPPKAD dalam proses pembangunan keuangan daerah adalah mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur.

Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Oleh karena itu dalam menunjang tercapainya Sasaran tersebut diatas, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo dirumuskan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Sama dengan tujuan agar sasaran dapat diukur pencapaiannya maka ditetapkan Indikator Sasaran dari masing-masing Sasasran yang telah ditetapkan, berikut Indikator Sasaran dari Sasaran yang sudah ditetapkan:

Sasaran Strategis ke-1 *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.

Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPPKAD selaku Badan yang menangani Pendapatan maka peningkatan PAD menjadi prioritas dalam upaya untuk memenuhi pendanan pembangunan daerah seiring dengan semakin berkurangnya dana dari pemerintah pusat baik berupa DAU, DAK dan Dana Perimbangan, salah satu upaya untuk meningkatkan PAD yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, inovasi dan terobosan dalam menggali sumber-sumber PAD sangat dibutuhkan, sumber-sumber PAD diantaranya terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Rata-rata pertumbuhan PAD dalam dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 kurang lebih 1,68% sehingga di akhir tahun 2024 ditargetkan PAD Kota Probolinggo mencapai Rp. 227.907.092.506,15.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pertumbuhan atau ***Persentase Kenaikan PAD*** tiap tahunnya dijadikan indikator dalam Sasaran Strategis ke-1, mengapa persentase kenaikan PAD ini dijadikan indikator karena untuk mengukur rata-rata pertumbuhan PAD setiap tahunnya itu berapa, idealnya persentase kenaikan PAD tiap tahunnya meningkat tidak flat atau datar, sehingga tiap tahun dapat dievaluasi perbandingan realisasi PAD tahun ini dengan tahun sebelumnya, jika terjadi penurunan hal tersebut disebabkan karena apa dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun berikutnya. Tahun 2022 ditargetkan pertumbuhan atau persentase kenaikan PAD sebesar 1,67% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis ke-2 ***Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah***

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dan akhirnya menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang merupakan indikator tujuan utama dari Renstra BPPKAD.

Indikator Sasaran Strategis ke-2 *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah* yaitu:

1. Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%
2. Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan
3. Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Tujuan dan Sasaran BPPKAD Tahun 2019-2024

MISI IV	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN BPPKAD	INDIKATOR TUJUAN BPPKAD	SASARAN BPPKAD	INDIKATOR SASARAN BPPKAD
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap LKPD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Opini BPK Terhadap LKPD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
							Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Amggaran Diatas 90%
								Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan
								Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset

TABEL 2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2019-2024
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

Tujuan OPD : ***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas***

Indikator Tujuan	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK Terhadap LKPD	Pernyataan Profesional Pemeriksa Mengenai Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Catatan: Opini Tahun (n) atas LKPD Tahun (n-1)

Sasaran			Realisasi		Target				Strategi	Bidang Pelaksana
Uraian	Indikator Kinerja	Formula Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	PAD (n) – PAD (n-1) / PAD (n) x 100%	0,75	4,51	1,67	1,67	1,68	2	Memaksimalkan potensi pajak melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi	Bidang PDL Bidang PBB & BPHTB
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMD	Persentase PD dengan Realisasi Diatas 90%	$\frac{LRA\ PD\ Diatas\ 90\%}{Jumlah\ PD}$ x 100%	41	39	45	50	55	60	Monitoring realisasi PD setiap Triwulan, jika tdk memenuhi target ada evaluasi anggaran.	Bidang Perben dan Kasda Bidang Anggaran
	Persentase PD dg LKPD yang Sesuai Ketentuan	$\frac{LKPD\ PD\ Sesuai\ Ketentuan}{Jumlah\ PD}$ x 100%	N/A	100	100	100	100	100	Bimtek Tenaga TA, Pendampingan penyusunan LKPD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
	Persentase PD Memiliki Kevalidan Data Aset	$\frac{PD\ memiliki\ kevalidan\ BMD}{Jumlah\ PD}$ x 100%	72	96	89	91	96	98	Inventarisasi dan verifikasi BMD, pendataan dan pencatatan dalam sistem aplikasi SIASAD.	Bidang Barang Milik Daerah

2.2. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2022 sebanyak tiga (4) program, empat belas (14) kegiatan dan enam puluh tiga (63) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,** terdiri dari ***kegiatan***:
   - **1.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:
     - 1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
     - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
     - 1.1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
     - 1.1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
     - 1.1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
     - 1.1.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
     - 1.1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
     - 1.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
     - 1.1.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
     - 1.1.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

   - **1.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:
     - 1.2.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

1.2.2 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

1.2.3 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1.2.5 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

1.2.6 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

1.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

1.3.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

1.3.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

1.3.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

1.3.4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

1.3.6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.3.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

1.3.8 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.3.9 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3.10 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

1.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

1.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

1.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, terdiri dari ***kegiatan***:

2.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

2.1.1 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

2.1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

2.1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah

2.1.4 Pengamanan Barang Milik Daerah

2.1.5 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

2.1.7 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3. **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH,** terdiri dari ***kegiatan***:
   - **3.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:
     - 3.1.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
     - 3.1.2 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
     - 3.1.3 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
     - 3.1.4 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
     - 3.1.5 Penetapan Wajib Pajak Daerah
     - 3.1.6 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
     - 3.1.7 Penagihan Pajak Daerah
     - 3.1.8 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

4. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,** terdiri dari ***kegiatan***:
   - **4.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:
     - 4.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 4.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - **4.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:
     - 4.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 4.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     - 4.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

4.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

4.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

4.4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

4.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

4.6.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

4.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

4.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto

4.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari ***Sub Kegiatan***:

4.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan / sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Perubahan Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024. Oleh karena itu indikator kinerja serta target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Berikut tabel 2.2 tentang Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Probolinggo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,67%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	60%
		Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	98%

	Program	Anggaran	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	38.9204.442.802,00	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.164. 508.2630,00	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	411.940.250,00	APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.836.650.805,00	APBD
	Jumlah :	**46.333.542.487,00**	

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,67%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	60%
		Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	98%

	Program	Anggaran	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	38.9204.442.802,00	APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.164. 508.2630,00	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	411.940.250,00	APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.836.650.805,00	APBD
	Jumlah :	**46.333.542.487,00**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja. Analisis dan evaluasi tingkat pencapaian kinerja dilakukan dengan tujuan agar diketahui capaian realisasi, kemajuan atau kendala yang dijumpai, dinilai, dipelajari, dicarikan solusi atau pemecahannya guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian misi.

Dalam pencapaian kinerja organisasi terdapat Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama ini akan memberikan gambaran sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo adalah **“Meningkatkan**

Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas" dengan indikator tujuan **"Opini BPK Terhadap LKPD"** serta terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

(1) **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dengan indikator sasaran atau indikator kinerja utama "***Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)***".

(2) **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah** dengan indikator sasaran atau indikator kinerja utama:

2.1. Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%

2.2. Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan

2.3. Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset

Salah satu upaya untuk mendorong kinerja organisasi agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan adalah melalui optimalisasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target yang telah ditetapkan dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditempuh dengan memaksimalkan potensi pajak daerah dan melakukan inovasi dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, membangun sistem database wajib pajak yang handal dan melakukan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Realisasi target kinerja sasaran strategis Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	1,67%	(9,97%)	(5,97%)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah

Hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 dapat dianalisa dari tabel 3.1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sasaran strategis Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama : ***Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)***.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama, *Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)* dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}(n) - \text{PAD}(n-1)}{\text{PAD}(n)} \text{ x } 100\%$$

Penjelasan:

PAD (n) : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun sekarang

PAD (n-1) : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun sebelumnya

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui berapa persen kenaikan realisasi PAD tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp. 191.609.790.123,99 (*unaudited*) sedangkan realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp. 212.835.237.756,23 (*audited*) atau ada penurunan sebesar Rp. 21.225.447.632,24 dari tahun sebelumnya atau terjadi persentase penurunan PAD tahun ini sebesar (9,97%) dari tahun sebelumnya.

Penurunan realisasi PAD ini disebabkan beberapa hal diantaranya Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 57.746.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 55.643.023.132,00 atau sebesar 96,36%, belum mencapai 100% atau lebih, jika dicermati dalam komponen Pajak Daerah tersebut maka ada beberapa obyek pajak yang belum tercapai misalnya Pajak Hiburan, target realisasi sebesar Rp. 1.621.150.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 690.509.404,00 atau sebesar 42,59%, rendahnya realisasi pada obyek pajak ini disebabkan belum ramainya hiburan yang dilaksanakan di masyarakat paska pandemi Covid-19. Contoh lain yaitu Pajak Parkir yang ditarget sebesar Rp. 400.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp. 191.760.700,00 atau sebesar 47,94%.

Sesuai dengan formulasi Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

$$\frac{\text{PAD}(t) - \text{PAD}(t-1)}{\text{PAD}(t)} \times 100\%$$

Maka diperoleh:

$$\frac{191.609.790.123,99 - 212.835.237.756,23}{191.609.790.123,99} \times 100\% = (\mathbf{9,97\%})$$

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / KURANG	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	73.632.735.320,00	73.422.911.540,35	99,72(209.823.779,65)	**99,72**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**60,341,856,147.00**	63.360.763.657,57	3.018.907.510,57	**104.99**
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.612.383.714,00	1.987.388.249,27	(375.004.535,27)	123,26
4.1.01.07	Pajak Restoran	8.270.356.288,00	9.837.978.245,30	(1.567.621.957,30)	118,95
4.1.01.08	Pajak Hiburan	780.744.642,00	918.427.153,00	(137.682.511,00)	117,63
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.460.318.695,00	1.473.075.647,00	(12.756.952,00)	100,87
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	18.836.954.370,00	21.086.431.432,00	2.249.477.062,00	111,94
4.1.01.11	Pajak Parkir	263.305.026,00	266.911.724,00	(3.606.698,00)	101,37
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	517.793.412,00	449.150.639,00	(68.642.773,00)	86,74
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	14.000.000.000,00	13.157.021.913,00	(842.978.087,00)	93,98
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.600.000.000,00	14.184.378.655,00	415.621.345,00	97,15
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**3.500.000.000,00**	**3.080.608.941,00**	**(419.391.059,00)**	**88,02**
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.989.948.244,00	8.069.844.905,00	(920.103.339,00)	89,77
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000.000,00	3.080.608.941,00	(419.391.059,00)	88,02
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.094.569.600,00	113.890.774,00	(980.678.826,00)	10,41
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**1.609.872.868,00**	**1.539.068.149,53**	**(70.804.718,47)**	**95,60**
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.609.872.868,00	1.539.068.149,53	(70.804.718,47)	95,60
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**8.181.006.305,00**	**5.442.470.792,25**	**(2.738.535.512,75)**	**66,53**
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	37.134.000,00	(62.866.000,00)	37,13
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	230.786.000,00	(230.786.000,00)	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.750.000.000,00	831.584.913,99	(918.415.086,01)	47,52
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.600.000.000,00	1.920.325.780,11	(2.679.674.219,89)	41,75
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.837.200,00	22.021.200,00	7.184.000,00	148,42
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.120.304.005,00	1.188.379.787,32	68.075.782,32	106,08
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22.115.100,00	174.879.696,40	152.764.596,40	790,77
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	352.250.000,00	712.805.763,43	360.555.763,43	202,36
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.500.000,00	96.084.601,00	94.584.601,00	6.405,64
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	127.458.360.000,00	109.457.955.147,20	(18.000.404.852,80)	85,88
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2022) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,16%	15,87%	221,65%	1,67%	(9,97%)	(5,97%)

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana realisasi indikator kinerja Persentase Kenaikan PAD sebesar 15,87%, maka pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar (9,97%) dari tahun 2023 atau ada penurunan realisasi sebesar Rp. 21.225.447.632,24 dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir periode RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	REALISASI 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	2%	(9,97%)	80,27%

Target Persentase Kenaikan PAD yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yaitu sebesar 2%. Pada tahun 2022 ini hanya mencapai sebesar (9,97%) atau dengan tingkat kemajuan sebesar 80,27% dari target di akhir Renstra, masih jauh dari angka ideal dan dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk mewujudkan target tersebut sampai pada akhir periode Renstra.

d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan

Alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 untuk sasaran *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah* yaitu:

Tabel 3.5. Alokasi per-Sasaran Pembangunan untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	2.907.280.091,00	2,43%

e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	1,67%	(9,97%)	(5,97%)	2.907.280.091,00	1.741.820.791,00	77,74%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah**	**4,5%**	**4,55%**	**100%**	**2.907.280.091,00**	**1.741.820.791,00**	**77,74%**
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	1,5%	1,55%	100%	2.907.280.091,00	1.741.820.791,00	77,74%

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	15,87%	77,74%	Efisiensi tercapai karena realisasi anggaran yang ada lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/ penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

Tabel 3.8. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TH. 2024	PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	(5,97%)	Target Kenaikan PAD tidak tercapai disebabkan beberapa faktor antara lain: 1. Kondisi perekonomian yang menurun karena dampak dari Pandemi Covid-19, yang mengakibatkan kemampuan fiskal menurun untuk semua lapisan usaha dan masyarakat 2. Walaupun sudah dilakukan stimulus untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tapi karena kondisi perekonomian yang lesu maka tetap tidak membuahkan hasil yang maksimal	1. Jika pandemi belum juga berakhir maka keringanan pemberian pajak tetap diberikan agar masyarakat tetap membayar pajak.

h. Analisis Program/ kegiatan yang Menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh program/kegiatan seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TH. 2021	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	(5,97%)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Stragtegis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator kinerja Persentase Kenaikan PAD didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan satu kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan delapan sub kegiatan memenuhi target tercapaianya kinerja Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Capaian Kinerja Sasaran Strategis *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah*

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Realisasi target kinerja sasaran strategis Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	100%	96,43%	104%
		Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	91%	82,14%	90,26%

Sampai dengan akhir Desember 2024 capaian untuk Indikator Kinerja Utama **Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%** sebesar 96,43% nilai tersebut diperoleh dari OPD yang telah merealisasikan anggaran Belanja Operasi lebih dari 90% sebanyak 26 OPD dari 27 OPD, berikut daftar OPD yang realisasi Belanja Langsung melebihi 90% diantaranya:

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Belanja Operasi SKPD Diatas 90%

NO	NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI Januari sd. 31 Des 2024	%
1	DINAS PERHUBUNGAN	28,029,846,738.00	27,667,176,781.00	98.71
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,563,091,384.00	10,194,192,178.00	96,51%
3	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	22,184,929,643.00	21,534,572,843.00	97,07%
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	9,373,473,742.00	8,868,754,617.00	94,62%
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6,105,862,259.00	5,990,846,018.00	98,12%
6	INSPEKTORAT	8,075,111,125.00	14,727,650,738.99	96,42%
7	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	15,554,425,523.00	15.776.325.705	94,68%
8	SEKRETARIAT DPRD	55,252,103,808.00	49,657,778,645.00	89,87%
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40,388,187,945.00	40,079,617,943.00	99.24

10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,036,262,343.00	3,904,309,139.00	96,73%
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	31,331,002,343.00	29,877,701,231.00	95,36%
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16,137,868,189.00	15,577,730,320.00	96,53%
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,629,936,406.00	4.589.428.073	92,67%
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	228,560,712,388.00	218,125,087,254.00	95,43%

NO	NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI sd. 31 Des 2024	%
15	SEKRETARIAT DAERAH	50,746,274,262.00	37.044.339.533	93,5%
16	KECAMATAN KANIGARAN	14,959,915,882.00	14,663,367,084.00	98,02%
17	KECAMATAN WONOASIH	14,415,022,746.00	13,770,521,146.00	95,53%
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	16,757,878,363.00	15,509,525,884.00	95,22%
19	KECAMATAN MAYANGAN	12,627,154,254.00	12,380,048,185.00	98,04%
20	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	10,796,548,989.00	10,106,197,338.00	93,61%
21	KECAMATAN KEDOPOK	14,199,030,605.00	13,621,554,705.00	95,93%
22	KECAMATAN KADEMANGAN	14,746,007,015.00	14,479,770,924.00	98,19
23	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11,988,002,575.00	11,760,376,527.00	98,1%
24	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	332,030,729,901.00	309,286,185,861.00	93,15%
25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59,131,465,170.00	56,570,771,670.40	95,67%
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	7,025,305,004.00	8.188.495.338	94,79%
27	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	46,333,542,487.00	41,843,657,652.00	90,31%

Masih belum maksimalnya realisasi belanja diatas 90% oleh tiap-tiap OPD disebabkan banyak faktor, diantaranya perencanaan anggaran yang kurang bagus dan di awal penyusunan Rencana Kerja APBD Murni atau ketika Perubahan APBD sehingga menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran, perencanaan dan penyerapan anggaran kas tidak maksimal.

Realisasi pencapai indikator **Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan** sebesar **100%** nilai ini diperoleh dari jumlah OPD yang telah menyelesaikan atau berproses dalam kelengkapan data kertas kerja penyusunan LKPD

mengacu atau sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Realisasi pencapai indikator **Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset** sebesar **90,26%** nilai ini diperoleh dari jumlah OPD yang asetnya telah terdata dan terupdate databasenya dengan valid ke dalam Sistem Informasi Aset

Daerah (SIASAD) sesuai antara fisik aset dengan informasi datanya, sampai dengan akhir Desember 2024 jumlah OPD yang valid data asetnya sebanyak 27 OPD dari 28 OPD, berikut daftar OPD yang valid data asetnya:

Tabel 3.11. OPD Memiliki Kevalidan Data Aset Sampai dengan akhir Desember 2024

NO	NAMA SKPD	SUDAH	BELUM
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	√	
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	√	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	√	
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	√	
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	√	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	√	
7	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	√	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	√	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	√	
10	DINAS PERHUBUNGAN	√	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	√	
12	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	√	
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	√	
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	√	
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	√	
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	√	
17	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	√	
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	√	
19	SEKRETARIAT DAERAH	√	
20	SEKRETARIAT DPRD	√	
21	INSPEKTORAT	√	
22	KECAMATAN WONOASIH	√	
23	KECAMATAN KADEMANGAN	√	
24	KECAMATAN MAYANGAN	√	
25	KECAMATAN KEDOPOK	√	
26	KECAMATAN KANIGARAN	√	
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	√	

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun lalu (2023) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 untuk Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023 (n-1)	REALISASI 20223 (n)
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	50%	45%	52%
		Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	91%	96,31%	85,14%

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi indikator kinerja rata-rata mengalami kenaikan, indikator Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90% tahun 2023 terealisasi 52% sedangkan tahun 2024 sebesar 45%, ada sedikit kenaikan di tahun 2023 disebabkan sudah berkurangnya pandemi Covid-19 dimana semua kegiatan sudah dapat direalisasikan secara maksimal, indikator Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan terealisasi sebesar 100% sama dengan tahun 2022, indikator Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset tahun 2023 terealisasi sebesar 82,14% dibandingkan tahun 2024 sebesar 96,31%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir periode RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	REALISASI 2022	TINGKAT KEMAJUAN
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	100%	52%	52%
		Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	100%	82,14%	82%

Tiga target indikator untuk mendukung sasaran strategis yang kedua rata-rata ditetapkan sebesar 100%, tingkat kemajuan pencapaian Renstra dari realisasi target tahun ini bervariasi nilai pencapaiannya, tertinggi pada indikator Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan sudah tercapai 100%, sedangkan pada kedua indikator lainnya masih dibutuhkan usaha yang maksimal untuk meningkatkan progress kemajuan pencapaian indikatornya.

d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan

Alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 untuk sasaran *Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* yaitu:

Tabel 3.14. Alokasi per-Sasaran Pembangunan untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	3.084.419.661,00	40%
		Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	821.151.200,00	8%
		Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	1.436.441.150,00	7%

e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	50%	45%	88%	3.084.419.661,00	2.860.927.400,00	92,75%
	Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	821.151.200,00	802.132.592,00	97,68%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	100%	100%	1.934.854.761,00	1.783.275.530,00	92,17%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Penatausahaan dengan Tepat	28 SKPD	28 SKPD	100%	1.149.564.900,00	1.077.651.870,00	93,74%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas	100%	100%	100%	821.151.200,00	802.132.592,00	97,68%

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	95%	96,31%	101,38%	1.436.441.150,00	1.407.407.637,00	97,98%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah yang Valid dan Akuntabel	85%	85%	100%	1.436.441.150,00	1.407.407.637,00	97,98%

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	45%	94%	Efisiensi tercapai karena realisasi kinerja lebih besar daripada realisasi
	Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	99%	Efisiensi tercapai karena realisasi kinerja lebih besar daripada realisasi
	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	96,31%	92%	Efisiensi tercapai karena realisasi kinerja lebih besar daripada realisasi

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/ penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

Tabel 3.17. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TH. 2022	PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	45%	Pelaksanaan kegiatan OPD sesuai dengan target dan perencanaannya hal ini juga didukung dengan kebijakan baik Walikota maupun Sekretariat Daerah perihal Optimalisasi Penyerapan Anggaran dengan dikeluarkannya beberapa Surat Edaran diantaranya: 1. Surat Pengendalian UP OPD Nomor: 900/2877/425.109/ 2020, tanggal 21 Juli 2020 2. Surat Edaran Optimalisasi Penyerapan APBD dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2020, nomor: 795/3668/425.109/ 2020, tanggal 23 September 2020	Mengeluarkan surat instruksi diantaranya : 1. Surat Pengendalian UP OPD Nomor: 900/2877/425.109/ 2020, tanggal 21 Juli 2020 2. Surat Edaran Optimalisasi Penyerapan APBD dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Akhir Tahun Anggaran 2020, nomor: 795/3668/425.109/ 2020, tanggal 23 September 2020
	Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	Sebagai bentuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK SKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kota Probolinggo diperlukan adanya langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD Kota Probolinggo yang dapat dipedomani oleh para pihak yang berkepentingan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Probolinggo, nomor 900/5040/425.209/2020 tentang Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PD Kota Probolinggo Tahun 2020	Mengeluarkan surat edaran Walikota Probolinggo, nomor 900/5040/425.209/2020 tentang Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PD Kota Probolinggo Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TH. 2022	PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	96,31%	Memiliki kevalidan data aset artinya OPD telah melakukan rekonsiliasi pengadaan belanja modal dan sudah melakukan update database SIASAD, faktor yang menentukan keberhasilan dalam memenuhi target diantaranya: 1. Adanya aplikasi yang mempermudah pengurus barang OPD dalam hal proses penatausahaan BMD melalui aplikasi SIASAD. 2. Adanya dukungan penuh dari pejabat pengelola barang OPD dalam hal penatausahaan BMD 3. Adanya pendampingan/ asistensi oleh tim penatausahaan BMD pada Bidang BMD BPPKAD Kota Probolinggo	Kegiatan penatausahaan BMD terrdapat beberapa implementasi diantaranya: 1. Rekonsiliasi atas belanja modal yang dilaksanakan setiap bulan 2. Rekonsiliasi atas update database SIASAD meliputi penghapusan, pemindahtanganan dan penyusutan BMD pada setiap OPD yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. 3. Pelayanan pendampingan dan konsultasi atas penatausahaan BMD yang dilaksanakan setiap hari kerja.

h. Analisis Program/ kegiatan yang Menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh program/kegiatan seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TH. 2022	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%	45%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TH. 2022	PROGRAM	KEGIATAN
	Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	96,31%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran Stragtegis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan indikator kinerja Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90% yang didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

Sasaran Stragtegis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan indikator kinerja Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan yang didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Sasaran Stragtegis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan indikator kinerja Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset yang didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada P-APBD tahun anggaran 2023, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.261.191.792. Besaran alokasi dan realisasi

anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	38.920.442.802,00	35.165.248.813,00	(3.755.193.989,00)	**90,35**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	22.006.300,00	21.307.149,00	(699.151,00)	96,82
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.506.300,00	16.934.399,00	(571.901,00)	96,73
5.02.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	4.500.000,00	4.372.750,00	(127.250,00)	97,17
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	35.699.536.222,00	32.086.850.061,00	(3.612.686.161,00)	89,88
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	35.546.938.922,00	31.947.909.772,00	(3.599.029.150,00	89,88
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	126.534.100,00	113.823.289,00	(12.710.811,00)	89,95
5.02.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	26.063.200,00	25.117.000,00	(946.200,00)	96,37
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	80.757.000,00	77.974.152,00	(2.782.848,00)	96,55
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	80.757.000,00	77.974.152,00	(2.782.848,00	96,55
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	808.880.192,00	753.573.193,00	(55.306.999,00)	93,16
5.02.01.2.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	787.840.192,00	747.716.393,00	(40.123.799,00)	94,91
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1.095.117.088,00	1.037.257.151,00	(57.859.937,00)	94,72
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	224.450.000,00	208.194.000,00	208.194.000,00	92,76
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	60.560.000,00	45.740.000,00	(14.820.000,00)	75,53
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.200.000,00	60.119.000,00	(81.000,00)	99,87
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	424.887.088,00	417.828.748,00	(7.058.340,00)	98,34
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	325.020.000,00	305.375.403,00	(19.644.597,00)	93,96
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	192.750.000,00	190.000.000,00	(2.750.000,00)	98,57
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	192.750.000,00	190.000.000,00	(2.750.000,00)	98,57
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	451.647.200,00	437.386.214,00	(14.260.986,00)	96,84
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	413.680.000,00	406.799.214,00	(6.880.786,00)	98,34

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	569.748.800,00	560.900.893,00	(8.847.907,00)	98,45
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	220.498.800,00	218.923.544,00	(1.575.256,00)	99,29
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	226.750.000,00	225.731.500,00	(1.018.500,00)	99,55
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	122.500.000,00	116.245.849,00	(6.254.151,00)	94,89
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	5.164.508.630,00	4.521.529.627,00	(642.979.003,00	87,55
5.02.02.2.01	**Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	1.848.902.600,00	1.580.679.932,00	(268.222.668,00)	85,49
5.02.02.2.01.01	Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan Ppas	719.044.800,00	648.163.039,00	(70.881.761,00)	90,14
5.02.02.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas	61.000.000,00	52.846.025,00	(8.153.975,00)	86,63
5.02.02.2.01.07	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd	144.448.500,00	117.923.350,00	(26.525.150,00)	81,64
5.02.02.2.01.08	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Apbd	905.954.300,00	743.300.768,00	(162.653.532,00)	82,05
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	18.455.000,00	18.446.750,00	(8.250,00)	99,96
5.02.02.2.02	**Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	851.103.300,00	820.208.020,0	(30.895.280,00)	96,37
5.02.02.2.02.01	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	95.641.000,00	93.399.108,00	(2.241.892,00)	97,66
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	28.570.000,00	28.567.000,00	(3.000,00)	99,99
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	77.136.000,00	63.506.064,00	(13.629.936,00)	82,33
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas Sp2D Dengan Instansi Terkait	16.458.000,00	16.264.650,00	- (193.350,00)	98,83
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	555.992.800,00	541.304.925,00	(14.687.875,00)	97,36
5.02.02.2.03	**Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah**	377.365.000,00	376.478.454,00	(886.546,00)	99,77
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo Dan Beban	152.686.000,00	152.157.108,00	(528.892,00)	99,65
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bulanan,	75.781.500,00	75.547.082,00	(234.418,00)	99,69

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
	Triwulanan Dan Semesteran				
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd, Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.245.000,00	59.191.700,00	(53.300,00)	99,91
5.02.02.2.03.05	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/Kota	44.562.500,00	44.544.900,00	- (17.600,00)	99,96
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	43.090.000,00	43.047.664,00	(42.336,00)	99,90
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	(342.974.509,00)	83,57
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	2.087.137.730,00	1.744.163.221,00	(342.974.509,00)	83,57
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	411.940.250,00	409.199.630,00	(2.740.620,00)	99,33
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	411.940.250,00	409.199.630,00	(2.740.620,00)	99,33
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.225.000,00	7.211.450,00	(13.550,00)	99,81
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	100,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	56.698.000,00	56.484.954,00	(213.046,00)	99,62
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	241.454.250,00	240.310.558,00	(1.143.692,00)	99,53
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	94.483.000,00	93.242.668,00	(1.240.332,00)	98,69
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.800.000,00	5.670.000,00	(130.000,00)	97,76
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	1.836.650.805,00	1.747.679.582,00	(88.971.223,00)	95,16
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	1.836.650.805,00	1.747.679.582,00	(88.971.223,00)	95,16
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	63.062.000,00	63.000.000,00	(62.000,00)	99,90
5.02.04.2.01.05	Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	573.702.572,00	557.762.559,00	(15.940.013,00)	97,22
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	52.874.200,00	51.374.200,00	(1.500.000,00)	97,16
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	336.847.583,00	305.068.577,00	(31.779.006,00)	90,57
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	38.176.000,00	36.956.120,00	(1.219.880,00)	96,80
5.02.04.2.01.09	Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	47.910.300,00	46.964.318,00	(945.982,00)	98,03
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	507.463.150,00	488.373.808,00	(19.089.342,00)	96,24
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	216.615.000,00	198.180.000,00	(18.435.000,00)	91,49
	JUMLAH BELANJA DAERAH	46,333,542,487.00	41,843,657,652.00	(4.489.884.835,00)	90.31

Total realisasi anggaran P-APBD tahun 2024 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 46,333,542,487.00

atau sebesar 90,31%, termasuk realisasi Belanja Operasi level realisasi belanja diatas 90%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan demikian, penyusunan dan pelaporan LKjIP ini merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Mandat dimaksud adalah janji Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 dengan Walikota Probolinggo.

LKJIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LKJIP ini diharapkan dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional sehingga dari nilai capaian kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan manfaat yang sangat berguna sebagaimana tujuan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

LKJIP ini mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, LKJIP Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA BPPKAD Kota Probolinggo tahun 2019-2024, selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ada beberapa target kinerja yang telah tercapai dan beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dibutuhkan usaha ekstra dan kerja keras untuk mewujudkan target kinerja tersebut sampai pada akhir periode Renstra.

4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, yaitu Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase OPD dengan Realisasi Anggaran Diatas 90%, Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan dan Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset diharapkan mendapatkan kenaikan score di tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo tahun 2024 maka dilakukan langkah–langkah antara lain:

a. Mencari terobosan dan inovasi dalam rangka pendataan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan dan memanfaatkan teknologi IT dalam pengelolaan dan penatausahaan pajak daerah.
b. Memaksimalkan perencanaan dan penganggaran dalam merealisasikan serapan kegiatan dan rutin melakukan evaluasi terhadap progress realisasi anggaran untuk tiap-tiap SKPD.
c. Agenda penyusunan laporan keuangan untuk tiap-tiap SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah harus tetap konsisten diupayakan agar target penyusunan bisa tepat waktu diselesaikan.
d. Penatausahaan BMD lebih intensif dilakukan semenjak dalam perencanaan, realisasi anggaran dan pencatatan dalam sistem aplikasi yang rutin dilakukan update dan dievaluasi.

MATRIKS RENSTRA BPPKAD KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2019-2024

Tujuan OPD : ***Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas***

Indikator Tujuan	Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK Terhadap LKPD	Pernyataan Profesional Pemeriksa Mengenai Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Catatan: Opini Tahun (n) atas LKPD Tahun (n-1)

Sasaran			Realisasi		Target				Strategi	Bidang Pelaksana
Uraian	Indikator Kinerja	Formula Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan PAD	PAD (n) – PAD (n-1) / PAD (n) x 100%	0,75	4,51	1,67	1,67	1,68	2	Memaksimalkan potensi pajak melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi	Bidang PDL Bidang PBB & BPHTB
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMD	Persentase PD dengan Realisasi Diatas 90%	$\frac{LRA\ PD\ Diatas\ 90\%}{Jumlah\ PD} \times 100\%$	41	39	45	50	55	60	Monitoring realisasi PD setiap Triwulan, jika tdk memenuhi target ada evaluasi anggaran.	Bidang Perben dan Kasda Bidang Anggaran
	Persentase PD dg LKPD yang Sesuai Ketentuan	$\frac{LKPD\ PD\ Sesuai\ Ketentuan}{Jumlah\ PD} \times 100\%$	N/A	100	100	100	100	100	Bimtek Tenaga TA, Pendampingan penyusunan LKPD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
	Persentase PD Memiliki Kevalidan Data Aset	$\frac{PD\ memiliki\ kevalidan\ BMD}{Jumlah\ PD} \times 100\%$	72	96	89	91	96	98	Inventarisasi dan verifikasi BMD, pendataan dan pencatatan dalam sistem aplikasi SIASAD.	Bidang Barang Milik Daerah

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P., M.M.**

Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP**

Jabatan : **Wali Kota Probolinggo**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP	**RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P., M.M.**
	Pembina Tk I
	NIP. 19730626 199803 2 00601

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,67%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	2	Persentase OPD dengan Realisasi Diatas 90%	60%
		3	Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%
		4	Persentase OPD Memiliki Kevalidan Data Aset	98%

Program :	**Anggaran**	**Keterangan**
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.920.442.802,00	APBD
2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.164.508.630,00	APBD
3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	411.940.250,00	APBD
4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.836.650.805,00	APBD
Jumlah :	**46.333.542.487,00**	

Probolinggo, Nopember 2024

Pihak Kedua

HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

Pihak Pertama

RATRI DIAN SULISTYAWATI, S.P., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19730626 199803 2 00601

RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA
ESELON II

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		CAPAIAN (%)
				2023 (*n - 1*)	2024 (*n*)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,67%	15,87%	(9,97%)	(5,97%)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD Dengan Realisasi Diatas 90%	50%	45%	52%	104%
		Persentase OPD dengan LKPD yang Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang Memiliki Kevalidan Data Aset	91%	96,31%	98,14%	90,26%